

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

# Ratusan Ojol Geruduk Gedung DPRD DKI

**JAKARTA (Poskota)** - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Predator (Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi) menggeruduk kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/1).

Aksi massa ini sebagai bentuk penolakan ojol sebagai pengguna kendaraan bermotor atas rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota.

Dia tas mobil komando (mokom) salah satu orator mengatakan, wacana pemberlakuan jalan berbayar dinilai sebagai aturan yang tidak pro terhadap rakyat dan sangat merugikan pengendara.

"Lihat kalau kita simak rancangan peraturan daerah itu ada pengecualian yang boleh melintas adalah

kendaraan umum plat kuning. Taksi online dan ojek online dilarang masuk jalur ERP atau dikenakan biaya," tegas orator didalam mokom.

Dalam tuntutan para driver ojol ini meminta agar anggota DPRD DKI Jakarta membatalkan rencana penerapan ERP sebagai bentuk keberpihakan wakil rakyat terhadap konstituennya.

Bahkan mereka mengancam, jika anggota DPRD DKI tidak mengindahkan tuntutan itu, mereka tidak bakal memilih kembali anggota DPRD DKI Jakarta yang saat ini duduk asik di parlemen Kebon Sirih. "Kalau tidak memikirkan kita, kita akan golput pada Pemilu 2024," tandasnya.

Dalam aksinya kali ini, pengemudi ojol meminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan anggota dewan lainnya untuk menemui barisan massa ojol

untuk memastikan rencana penerapan ERP dibatalkan sepenuhnya.

## Diperjuangkan

Di tengah aksi massa, dua anggota dewan menemui mereka. Kedua anggota tersebut ialah, Ismail dari Ketua Komisi B sekaligus Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dan Wa Ode Herlina Sekretaris Komisi B yang juga Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI.

Dihadapan ratusan pendemo, Ismail menegaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak keras wacana penerapan jalan berbayar di Jakarta. Tuntutan massa ojol pun akan diperjuangkan dalam rapat di Komisi B dengan Eksekutif. "Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP). mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar fraksi PKS bisa memperjuangkan ini," ucap

Ismail dihadapan massa ojol.

Sedangkan pernyataan yang dilontarkan oleh Wa Ode ambigu. Sebab, Kata dia, PDI Perjuangan sebagai partai rakyat kecil akan mati-matian mendukung penolakan pembatalan ERP.

"Baik, kalau dari saya, yang namanya dari rakyat, lahirnya dari hati sanubari kalian, apa yang kalian harapkan, partai wong cilik pasti mendukung apa yang kalian inginkan kita akan kawal ini sesuai kemauan masyarakat," tegasnya dengan lantang.

Ungkapan tersebut pun mendapat sorakan yang gemuruh dari ratusan massa ojol. Lantaran mereka tak puas dengan jawaban Wa Ode yang masih belum jelas.

Lalu Anggota DPRD DKI Daerah Pemilihan (Dapil) Jakpus ini melanjutkan, bakal memper-

juangkan kemauan massa. "PDI Perjuangan, gimana maunya rakyat, itu pasti yang diikuti. gitu aja. merdeka," lanjut Wa Ode.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan memberlakukan kebijakan Elektrik Road Pricing (ERP) pada tahun 2023 ini. Hal ini sebagai upaya Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

Aturan tersebut pun tercantum dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, yang ditetapkan oleh Anies Baswedan saat jadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam draft tersebut dijelaskan secara rinci definisi, pengawasan, penanggung jawab, ruas jalan, jenis kendaraan, jam berlaku, hingga sanksi yang diterapkan bagi pelanggar. (Aldi/ylh)